

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH **COLLABORATION GOVERNANCE IN WASTE MANAGEMENT**

Niluh Eka Puri Setiawandari*, Arimurti Kriswibowo

Prodi Administrasi Publik, FISIP, UPN Veteran Jawa Timur, Surabaya

*Koresponden email: arimurti.adne@upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Kabupaten Lamongan sampai saat ini menghadapi permasalahan sampah, bertambahnya jumlah timbunan sampah yang ada di Kabupaten Lamongan yang semakin banyak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta yang terjadi di TPST Sampah Tanggung Jawabku. Untuk mengurangi jumlah timbunan sampah di TPA, pemerintah telah membangun Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi secara langsung. Berdasarkan temuan penelitian, proses kerjasama di TPST Sampah Tanggung Jawabku di Kabupaten Lamongan berjalan dengan baik meskipun masih terdapat hambatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola kolaboratif telah berjalan secara optimal, hal ini terlihat dari aspek kolaborasi Ansell and Gash.

Kata kunci: *Collaborative governance*, pengelolaan, sampah

ABSTRACT

Until now, Lamongan Regency is facing a waste problem, the increasing number of landfills in Lamongan Regency is increasing. This study aims to find out how the process of collaboration between the government, the community and the private sector occurs at the My Responsibility Waste TPST. To reduce the amount of waste dumped in TPA, the government has built an Integrated Waste Management Site (TPST). The research method used in this research is qualitative. Collecting data using interview techniques, observation and documentation directly. Based on research findings, the collaboration process at the My Responsibility TPST in Lamongan Regency is going well although there are still obstacles. This research concludes that collaborative governance has run optimally, this can be seen from the collaboration aspect of Ansell and Gash.

Keywords: *Collaborative governance, management, waste*

PENDAHULUAN

Aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam setiap harinya selalu menghasilkan sampah. Kegiatan manusia yang semakin hari semakin meningkat mengakibatkan timbunan sampah yang dihasilkan juga bertambah, jika jumlah sampah yang masuk pada TPA terus bertambah tanpa adanya upaya pengelolaan sampah yang baik, maka akan berdampak pada masalah lingkungan seperti bau tidak sedap, pemandangan yang buruk, bahkan dapat menyebabkan banjir (Torang, 2022). Jumlah Timbunan sampah akan terus bertambah pada setiap tahun nya berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk dan kualitas kehidupan masyarakat

Kabupaten Lamongan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memperoleh penghargaan Adipura kencana pada tahun 2011, 2013, dan 2014. Selanjutnya, kabupaten lamongan meraih penghargaan kembali yaitu Adipura Kirana pada tahun 2016 dan tahun 2019. Sebagai salah satu kota yang mendapatkan penghargaan, Kabupaten Lamongan belum mampu melakukan pengelolaan sampah dengan baik. Masih banyak

masalah pengelolaan sampah yang harus dihadapi pemerintah. Fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk menunjang kegiatan pengelolaan sampah masih kurang, hal itu menjadi penyebab masyarakat masih membuang sampah secara sembarangan.

Kabupaten Lamongan sebagai salah satu kabupaten di Jawa Timur juga menghadapi permasalahan persampahan. Perkembangan dan pertumbuhan penduduk akan berdampak pada tingkat konsumsi masyarakat yang berdampak pada meningkatnya volume sampah (Tuti, 2022). Saat ini kabupaten lamongan mengalami peningkatan penduduk yang cukup signifikan, dalam 5 tahun terakhir perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Lamongan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Salah satu masalah yang belum terselesaikan di Indonesia adalah sampah. Dengan meningkatnya kepadatan penduduk. Limbah yang dihasilkan juga semakin meningkat. Sampah rumah tangga, sampah bisnis, sampah pasar, dan terutama sampah perkotaan menghasilkan berbagai jenis sampah (Saputra et al., 2022). Pertumbuhan

penduduk yang ada di Kabupaten Lamongan berpengaruh terhadap volume sampah yang dihasilkan setiap harinya. Selain kepadatan penduduk budaya hidup masyarakat yang belum berubah juga menjadi masalah, tidak melakukan pemilahan sampah dari sumbernya dan juga masih membuang sampah di sembarang tempat. Selain itu, masyarakat di Kabupaten Lamongan kebanyakan masih melakukan pembakaran sampah di pinggir jalan sehingga menimbulkan masalah baru. Pemerintah kabupaten lamongan mengalami kendala dalam menangani volume sampah yang terus meningkat yang berasal dari kegiatan masyarakat setiap harinya. Menurut data DLH Kabupaten Lamongan tahun 2018 jumlah timbulan sampah di Kabupaten Lamongan mencapai 393,18 ton/hari tetapi yang bisa dikelola hanya 55 ton saja, sisanya masih belum dapat ditangani dengan baik. Angka tersebut tergolong besar karena berpengaruh pada ketersediaan lahan TPA Tambakrigadung. Pengelolaan sampah yang kurang baik salah satunya disebabkan karena kabupaten lamongan hanya memiliki satu tempat pembuangan akhir atau TPA yaitu di Desa Tambakrigadung Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.

Pemerintah Kabupaten Lamongan menyadari masih memiliki keterbatasan dalam melakukan kegiatan pengelolaan sampah, sehingga pemerintah Kabupaten Lamongan membuat strategi untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah yang ada di Tempat Pembuangan Akhir atau TPA, salah satunya yaitu dengan Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST). Program ini diresmikan pada tahun 2020 dan dijalankan secara aktif sampai saat ini. Adanya pembangunan TPST merupakan bentuk Implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah. Diharapkan dengan adanya TPST dapat mengurangi permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Lamongan. Saat ini di Kabupaten Lamongan hanya ada satu TPST yaitu TPST SAMTAKU (Sampah Tanggung Jawabku).

TPST Samtaku mampu menampung 50 Ton sampah setiap harinya. Adanya TPST ini dapat dikatakan berperan penting dalam penanganan sampah di Kabupaten Lamongan. Selain jumlah lahan yang luas dan dapat menampung residu yang besar, TPST Samtaku ini memiliki sarana prasana yang lengkap dan menggunakan teknologi berstandart internasional (*Verra*) secara terintegrasi. Sehingga mulai dari proses pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, dan pemrosesan sampah di Kabupaten Lamongan banyak dilakukan di TPST Samtaku ini. Namun, Pemerintah

juga mengalami kendala dalam pengangkutan sampah dari TPS ke TPST dikarenakan kurangnya transportasi pengangkut sampah.

Kegiatan pengelolaan sampah di TPST Samtaku Kabupaten Lamongan melibatkan beberapa pihak antara lain yaitu pihak pemerintah, swasta, dan juga masyarakat. Kerjasama yang dilakukan antar *stakeholder* dalam pengelolaan sampah di TPST Samtaku mencirikan adanya *collaborative governance*. Menurut Emerson et al., (2012:2) dalam jurnal (Molla et al., 2021). Ungkapan "tata kelola kolaboratif" digunakan dalam konteks manajemen untuk menggambarkan proses struktural di mana pengambilan keputusan kebijakan publik menggabungkan banyak pemain konstruktif dan berasal dari berbagai sektor, termasuk pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, yang tidak dapat dicapai jika prosedurnya dilakukan oleh satu pihak saja. Oleh karena itu, hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan. *Collaborative governance* ada untuk merespon masalah yang terjadi pada masyarakat. Kolaborasi yang ada adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kerjasama dalam pengambilan keputusan yang formal, eksplisit, dan diarahkan pada orientasi kolektif (Amelinda & Kriswibowo, 2021).

Pada pelaksanaan Kolaborasi yang terjalin antara instansi pemerintah dengan instansi non pemerintah dalam pengelolaan sampah di TPST Samtaku Kabupaten Lamongan dapat dikatakan belum berjalan dengan cukup baik karena tujuan adanya pembangunan TPST Samtaku tersebut belum tercapai sepenuhnya. Permasalahan pertama Pemerintah yang hanya memiliki 12 armada pengangkut sampah mengalami kendala dalam pengangkutan dari TPS ke TPST sehingga masih banyak sampah yang berceceran di TPS liar seperti di pinggir jalan maupun pinggir sungai. Permasalahan kedua yaitu dalam pelaksanaan *Collaborative Governance* dibutuhkan juga peran masyarakat. Namun kesadaran masyarakat kabupaten lamongan masih sangat minim dibuktikan dengan masih banyak TPS liar yang ada di Kabupaten Lamongan. Terdapat 60 titik penyebaran TPS liar pada 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Lamongan menyebabkan permasalahan sampah di Kabupaten Lamongan belum teratasi dengan baik.

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa pengelolaan sampah di TPST Samtaku Kabupaten Lamongan yang mempunyai tujuan mengurangi volume sampah yang tinggi dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah di pinggir jalan, di pinggir sungai

maupun tempat pembuangan sampah liar belum berjalan dengan optimal.

METODE

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang situasi atau proses yang diteliti, serta untuk mendeskripsikan secara detail kajian penelitian tentang tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah di TPST. SAMTAKU, Kabupaten Lamongan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang situasi atau proses yang diteliti. Konsekuensinya, kemampuan menghasilkan respon yang secara tepat menjelaskan suatu fenomena yang terjadi di area yang menjadi fokus utama penyelidikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran, masukan, dan gagasan kepada para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di TPST SAMTAKU yang terletak di Kabupaten Lamongan untuk perbaikan proses tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk keperluan inkuiri ini adalah observasi terbuka atau terselubung, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi berupa arsip dokumen, rekaman, dan gambar kegiatan.

Informan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling yang terdiri dari kepala bagian pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan (Pemerintah), kepala seksi pengurangan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, kepala TPST SAMTAKU Kabupaten Lamongan, pihak pengelola Dompot Dhuafa (Masyarakat), pihak PT. Reciki Solusi Indonesia (Swasta). Dalam proyek penelitian khusus ini, metode analisis data meliputi langkah-langkah berikut: pengumpulan data, pemadatan data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan penentuan keabsahan data melalui penggunaan dua jenis triangulasi yang berbeda: triangulasi sumber dan triangulasi teknis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu strategi Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah program pembangunan pengelolaan sampah terpadu (TPST) di Kabupaten Lamongan yang mulai dibangun pada tahun 2019 dan mulai beroperasi di Tahun 2020. Tujuan pembangunan TPST ini adalah agar pengurangan sampah dapat dilakukan dari sumbernya yaitu masyarakat. Selain itu, dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Lamongan penulis menggunakan model tata kelola kolaboratif Ansell & Gash

(2008) yaitu, Kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, Desain kelembagaan, Proses Kolaboratif. Model dapat dikurangi lebih lanjut menjadi sub-bagian. Dimana proses kolaboratif, merupakan inti dari model ini. Sedangkan kondisi awal, desain kelembagaan, dan kepemimpinan fasilitatif didefinisikan sebagai pendukung yang dapat memberikan kontribusi penting dalam proses kolaboratif. Model kolaborasi ini dipilih karena menggambarkan secara detail bagaimana proses kolaborasi bersifat siklus.

Selain itu peneliti menggunakan teori ini karena sebelum terjadi kerjasama dalam proses pengelolaan sampah di Kabupaten Lamongan, terdapat kegiatan kepemimpinan, kepercayaan antar aktor, komitmen bersama, dan struktur kelembagaan. Ini mencirikan praktek kolaboratif. Selain itu, penanganan masalah sampah di TPST Samtaku Kabupaten Lamongan melibatkan kerjasama pemerintah dan non pemerintah yang menjadi ciri dari praktek *collaborative governance*.

Kondisi Awal

Dapat diartikan sebagai awal sebelum kerjasama terjadi hingga bagaimana proses kerjasama antar pemangku kepentingan dapat terjalin. Menurut Ansell & Gash (2008) kondisi awal tersebut diatas dapat dipengaruhi oleh 3 indikator yaitu, ketidakseimbangan sumber daya dan pengetahuan antar aktor kolaborasi, adanya aspek insentif (motivasi) yang jelas, kendala stakeholders untuk berkolaborasi (Konflik). Dalam penelitian ini, faktor motivasi yang menyebabkan para aktor ikut dalam proses kolaborasi berawal dari ketidakmampuan antar masing-masing *stakeholders* mengatasi masalah yang ada.

Pemerintah Kabupaten Lamongan tidak mampu menangani permasalahan di lingkungannya seperti banyak sampah yang setiap hari semakin tidak teratasi, banyak masyarakat yang membuang sampah secara liar, kurang penghijauan di daerah sekitar permukiman yang berakibat pada pencemaran udara meningkat dan masalah banjir. Selanjutnya PT. Reciki Solusi Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan sampah yang membutuhkan sampah untuk dikelola dan menjadi komitmen perusahaan untuk mengurangi timbulan sampah. Sedangkan peran pemerintah dalam penanganan sampah sebagai pembuat kebijakan, melakukan pengawasan, serta memiliki kewajiban untuk memberikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Kemudian ketimpangan sumber daya dan pengetahuan terlihat dari rendahnya jumlah sumber daya manusia yang tidak memiliki keterampilan untuk melakukan pengelolaan sampah. Rendah-

nya sumber daya manusia yang belum memiliki keterampilan dalam melakukan pengelolaan sampah serta pada sarana dan prasarana yang belum ada. Para pekerja di TPST Samtaku Kabupaten Lamongan pada awalnya dikelola oleh masyarakat yang memiliki perbedaan latar belakang khususnya di bidang pendidikan agak sulit bagi mereka dalam memahami tata cara pengelolaan sampah yang benar dan efektif.

Selanjutnya faktor yang menjadi penghambat adalah adanya konflik sosial dengan masyarakat desa setempat. Ansell & Gash (2008) mengemukakan bahwa konflik cenderung menciptakan tingkat kepercayaan yang rendah, yang pada gilirannya akan menghasilkan tingkat komitmen, strategi manipulasi, dan komunikasi yang tidak jujur. Faktor yang menjadi adanya kendala adalah sumber daya yang ada pada TPST Samtaku Kabupaten Lamongan. Pada saat awal berdirinya TPST sumber daya manusia yang masih rendah. Masyarakat yang mengelola sampah belum memiliki keterampilan dan pengetahuan tentang sampah.

Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan mengacu pada aturan Pendekatan kemitraan Ansell & Gash dipandu oleh serangkaian prinsip dan praktik serta dicirikan oleh administrasi yang transparan (2008). Regulasi yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah, dan Nota Kesepahaman dengan PT. Reciki Solutions Indonesia menjadi pondasi pengelolaan sampah di TPST Samtaku di Kabupaten Lamongan. Selain itu, menurut Molla et al. (2021), regulasi adalah kekuasaan yang diterima dari lembaga atau organisasi untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan yang berada dalam yurisdiksi mereka. Definisi ini didasarkan pada definisi regulasi yang diberikan oleh Molla et al. Di TPST Samtaku di Kabupaten Lamongan, tata kelembagaan pengelolaan sampah sudah berada pada level yang sebaik mungkin. Terlihat bahwa perusahaan pengelola sampah telah mengikuti kesepakatan kerja yang tertuang dalam MOU.

Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan fasilitatif merupakan unsur penting dalam *collaborative governance*. Dalam jurnal mereka, Ansell & Gash (2008) menyatakan "kepemimpinan sangat penting untuk menetapkan dan mempertahankan aturan dasar yang jelas, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog, dan mengeksplorasi keuntungan bersama". Se-

dangkan menurut Vagen maintaning dan Huxman (2003) dalam skripsi Andryani (2019), berpendapat bahwa kepemimpinan digunakan untuk memberdayakan serta memobilisasi para pemangku kepentingan untuk meningkatkan proses kolaborasi. Sehingga, kepemimpinan yang efektif dan bertanggung jawab akan membawa keberhasilan dalam proses kolaborasi.

Kepemimpinan yang dilakukan di TPST Samtaku Kabupaten Lamongan belum optimal sepenuhnya. Para pelaku kolaborasi dalam pengelolaan sampah di TPST Samtaku Kabupaten Lamongan telah menjalankan perannya masing-masing sesuai dengan tupoksinya. Namun kepemimpinan fasilitatif dalam pengelolaan sampah di TPST Samtaku Kabupaten Lamongan lebih dominan dilakukan oleh Pihak Swasta. Peran pemerintah di TPST Samtaku Kabupaten Lamongan hanya sebagai pembuat kebijakan, sedangkan peran dari Dompot Dhuafa hanya menjadi edukator kalau pemerintah meminta saja.

Proses Kolaborasi

Dialog Tatap Muka

Menurut Ansell dan Gash (2008), langkah pertama dalam proses tata kelola kolaboratif adalah dialog tatap muka antara berbagai pemangku kepentingan. Menurut para penulis ini, langkah ini adalah bagian terpenting dari proses karena di situlah kepercayaan, saling menghormati, saling pengertian, dan komitmen terhadap proses dibangun. Proses mencapai konsensus dipecah menjadi tiga tahap yang berbeda, menurut Susskind dan Cruikshank (1987:95), seperti dikutip dalam Bustomi et al. (2022). Fase-fase ini adalah praneosiasi, negosiasi, dan implementasi, masing-masing.

Sebelum terbangunnya TPST Samtaku Kabupaten Lamongan sering diadakan pertemuan dengan para aktor kolaborasi tetapi Sejak terbangunnya TPST hingga saat ini pengelolaan sampah di TPST Samtaku Kabupaten Lamongan tidak pernah melakukan pertemuan dalam bentuk forum dialog tatap muka untuk membahas penanganan sampah, hanya melakukan laporan saja setiap bulan. Dialog tatap muka yang dilakukan ini bertujuan untuk berbagi informasi, tujuan bersama serta pemahaman satu sama lain dalam menangani permasalahan pengelolaan sampah. Dalam laporan yang dilakukan dilaporkan tentang kinerja dan evaluasi kinerja masing-masing kolaborator dalam proses pengelolaan sampah selama satu tahun. Kinerja sangat penting untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan pegawai dalam melaksanakan

tugas yang dibebankan kepadanya (Kriswibowo et al., 2018).

Disarankan agar sering dilakukan pertemuan dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah di TPST Samtaku Kabupaten Lamongan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan-pertemuan. Rekomendasi ini didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Meier dan O'Toole Jr. (2002) dalam (Idris et al., 2022). Menurut teori ini, keberhasilan program ditonjolkan oleh proses kerjasama antar organisasi yang membutuhkan kerjasama. Teori ini dikutip dalam (Idris et al., 2022). Di sisi lain, belum ada pertemuan terus-menerus di antara para aktor yang sekarang bekerja sama.

Membangun Kepercayaan

Proses membangun kepercayaan dalam pengelolaan sampah di TPST Samtaku Kabupaten Lamongan dilakukan dengan komunikasi yang intens baik secara formal maupun informal. antar pelaku kolaborasi. Komunikasi formal misalnya melalui koordinasi dalam kegiatan pelaksanaan terkait sampah. Sedangkan bentuk komunikasi informal dilakukan koordinasi melalui whatsapp. Komunikasi yang sering dilakukan ini memperkuat kepercayaan antar pelaku kolaborasi. Namun, diketahui bahwa pelaksanaan koordinasi dalam bentuk sosialisasi terkait pengelolaan sampah dan mengedukasi masyarakat masih jarang dilakukan oleh para pelaku kolaborasi kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada para pelaku kolaborasi.

Adanya transparansi juga menjadi salah satu cara membangun kepercayaan antar para pelaku kolaborasi dalam pengelolaan sampah di TPST Samtaku Kabupaten Lamongan. Bentuk dari transparansi ini adalah laporan kinerja. Adanya transparansi ini membuat proses kolaborasi berjalan dengan lancar. Hal ini sesuai dengan pendapat Siswanto & Aldridge dalam Pratolo (2008), yang mengatakan adanya pengungkapan informasi organisasi secara transparan kepada para pemangku kepentingan memiliki peran yang besar, antara lain informasi tersebut menjadi salah satu sarana penting bagi stakeholder untuk mengawasi jalannya kegiatan organisasi.

Komitmen Terhadap Proses

Suatu kegiatan tidak akan berhasil apabila para pelakunya tidak mempunyai komitmen yang kuat dalam proses pelaksanaannya. Jadi apabila komitmen dari pemangku kepentingan kurang, maka akan menjadi suatu permasalahan (Ansell & Gash, 2008). Selain itu, (Arifin & Utami, 2018) berpendapat bahwa sesungguhnya komitmen adalah sebuah keyakinan bahwa dengan collaborative

governance akan menciptakan keuntungan untuk masing-masing pihak dan kepentingan publik.

Komitmen yang lahir di dalam proses collaborative governance dalam pengelolaan sampah di TPST Samtaku Kabupaten Lamongan diawali dari adanya kebutuhan dari masing-masing pelaku kolaborasi. Adanya kepentingan ini memunculkan komitmen yang kuat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Komitmen dalam proses kolaborasi yaitu untuk mengurangi jumlah residu sampah yang masuk ke TPA Tambakrigadung dengan melakukan pengelolaan sampah yang efektif dan efisien, dan menjaga lingkungan seperti sungai dan jalanan agar terbebas dari sampah. Sehingga dari adanya kepentingan masing-masing pihak, para pelaku kolaborasi mempunyai komitmen yang kuat, dibuktikan dari adanya bantuan-bantuan dari PT. Reciki Solusi Indonesia yang memberikan bantuan sarana dan prasarana.

Kesepahaman Bersama

Ansell & Gash (2008), mengemukakan bahwa para pemangku kepentingan harus memiliki pemahaman yang sama dari diadakannya kolaborasi, seperti visi dan misi, tujuan yang jelas, dan penyelarasan inti masalah. Selanjutnya, (Bustomi et al., 2022) menyatakan pada titik tertentu dalam proses kolaborasi, para pemangku kepentingan harus mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang dapat mereka capai bersama.

Pada pelaksanaannya, para pelaku kolaborasi yaitu DLH Kabupaten Lamongan, Dompot Dhuafa dan PT. Reciki Solusi Indonesia telah memiliki kesepahaman yang sama. Mereka telah paham mengenai visi dan misi diadakannya kolaborasi serta mereka juga telah memahami perannya masing-masing dalam proses kolaborasi. Para pelaku kolaborasi juga memahami tujuan dari diadakannya kolaborasi yaitu untuk mengurangi jumlah timbulan sampah dengan melakukan pengelolaan sampah yang efektif.

Selain itu, bentuk upaya membangun pemahaman bersama antar stakeholders dilakukan dengan koordinasi dan musyawarah. Namun, antara pelaku kolaborasi dengan masyarakat masih belum memiliki kesepahaman yang sama mengenai pentingnya melakukan pengelolaan sampah dari sumbernya, dan juga dampak dari membuang sampah sembarangan. Hal ini menjadi hambatan utama dalam proses kolaborasi pengelolaan sampah di TPST Samtaku Kabupaten Lamongan, yaitu mengubah kesepahaman dan pola pikir masyarakat. Kurangnya kesepahaman masyarakat dikarenakan peran dari *stakeholders* yang masih minim dalam melakukan sosialisasi.

Hasil Sementara Kolaborasi

Ansell & Gash (2008) mengemukakan bahwa hasil antara merupakan hasil yang nyata dari kolaborasi, ini sebagai proses penting untuk membangun momentum yang dapat mengarah pada kesuksesan proses kolaborasi.

Tahun	Provinsi	Kabupaten/Kota	Timbulan Sampah Harian(ton)
2021	Jawa Timur	Kab. Lamongan	221.94
2022	Jawa Timur	Kab. Lamongan	228.06

Berdasarkan teori dan hasil yang didapatkan dari temuan di lapangan terkait proses kolaborasi dengan stakeholders di TPST Samtaku Kabupaten Lamongan yaitu timbulan sampah di Kabupaten Lamongan telah berkurang dibuktikan dengan berkurangnya tempat pembuangan sampah liar dan juga dapat memperpanjang umur TPA. Namun masih ada beberapa keluhan dari pihak swasta yaitu kurangnya support dari pemerintah terkait pengangkutan sampah yang datang terlambat dan kurangnya dilakukan edukasi sosialisasi terkait sampah serta sampah yang dibawa ke TPST tidak sesuai kesepakatan sehingga mengganggu proses pengolahan.

Proses pengelolaan sampah di TPST Samtaku Kabupaten Lamongan sudah cukup optimal, dilihat dari jumlah residu sampah yang dibawa ke TPA Tambakrigadung sesuai dengan target. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan di TPST Samtaku Kabupaten Lamongan juga selalu terpenuhi. Kemudian dampak dari seringnya dilakukan koordinasi dan musyawarah juga meningkatkan motivasi para pelaku kolaborasi. Sehingga stakeholders dapat meningkatkan produktivitas dan kepercayaan akan terbangun. Proses kolaborasi yang efektif membawa pada stabilitas. Seperti pendapat Vangen dan Huxman dalam Ansell & Gash (2008), Keberhasilan kecil ini dapat memberikan *feedback* dalam proses kolaboratif, mendorong membangun kepercayaan, dan komitmen yang baik.

KESIMPULAN

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, Dompot Dhuafa, dan PT.Reciki Solusi Indonesia bersinergi melakukan tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah di TPST Samtaku Kabupaten Lamongan. Dapat disimpulkan bahwa tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah di TPST Samtaku Kabupaten Lamongan sudah cukup optimal, berdasarkan uraian hasil

penelitian yang telah dikemukakan. Hal ini dimungkinkan karena dapat disimpulkan bahwa Collaborative Governance sudah cukup optimal. Hal ini dikarenakan proses *collaborative governance* telah terbentuk dan sedang berjalan, yang ditunjukkan dengan adanya 1) Kondisi awal terbentuknya kerjasama memunculkan insentif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, yang menyebabkan stakeholder memiliki komitmen yang kuat terhadap proses kolaborasi. 2) Hanya satu pemain dalam upaya kolaboratif yang berpotensi mendominasi peran kepemimpinan fasilitatif. 3) Struktur organisasi TPST Samtaku Kabupaten Lamongan tidak seefektif yang seharusnya. 4) Forum obrolan tatap muka sangat jarang diadakan akhir-akhir ini. 5) Organisasi belum membuat kemajuan yang cukup dalam membangun budaya kepercayaan di antara para anggotanya. 6) Adanya dedikasi yang kuat terhadap proses yang mengikutsertakan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. 7) Masih adanya kesenjangan komunikasi antara masyarakat dengan penanggung jawab pengelolaan sampah. 8) Berdasarkan hasil evaluasi sementara, telah disimpulkan bahwa tujuan kemitraan telah tercapai; meskipun demikian, masih ada kendala, dan sektor swasta terus menyuarakan keprihatinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelinda, A. D., & Kriswibowo, A. (2021). Collaborative Governance In Waste Management (Study In The Integrated Waste Management Site Of Tambakrejo Area, Sidoarjo Regency). *Dia*, 19(1), 29–40. <https://doi.org/10.30996/dia.v15i2.4842>
- Andryani, W. (2019). *Collaborative Governance Dalam Inovasi Program Smart Health (Studi pada Desa Sepanjang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)*.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Arifin, S., & Utami, D. (2018). Collaborative Governance Dalam Program Rintisan Desa Inklusif di Desa Sendangadi Kecamatan Mlati. *E-Jurnal Fisip UNY*, 7(3), 315–332.
- Bustomi, T., Ariesmansyah, A., & Kusdian, A. (2022). Partisipasi Publik dalam Collaborative Governance Pada Program Sister City Bandung dan Jepang Dalam Menanggulangi Sampah di Kota Bandung. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*,

- 13(Vol. 13 No. 1), 48–64.
<https://doi.org/10.23969/kebijakan.v13i1.5037>
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). Evaluating the productivity of collaborative governance regimes: A performance matrix. *Public Performance and Management Review*, 38(4), 717–747.
<https://doi.org/10.1080/15309576.2015.1031016>
- Idris, I., Herdiana, D., & Mujtahid, I. M. (2022). Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah di Wilayah Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(3), 9810–9819.
<https://doi.org/10.36312/jisip.v6i3.3269>
- Khairiyah, N., & Zulkarnaini, Z. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana Oleh Baznas di Kabupaten Kampar. *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, 3(3), 258-266.
- Kriswibowo, A., Harsanto, B. T., & Kurniasih, D. (2018). Upaya Meningkatkan Kinerja Pegawai Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Banyumas. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7(2).
<https://doi.org/10.33005/jdg.v7i2.1205>
- Molla, Y., Supriatna, T., & Kurniawati, L. (2021). Collaborative Governance dalam Pengelolaan Kampung Wisata Praiijing di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabu-Bak Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(2), 140–148.
<https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2.1790>
- Pratolo, S. (2008). Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dalam Hubungannya dengan Perwujudan Keadilan dan Kinerja Pemerintah Daerah: Sudut Pandang Aparatur dan Masyarakat di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 9(2), 108–124.
- Saputra, T., Astuti, W., Nasution, S. R., & Zuhdi, S. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Bank Sampah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(3), 246–251.
- Sudaryono. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syaiful Islamy H. (2018). *Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Torang Hedomuan, M., & WD Tuti, R. (2022). Evaluasi Kebijakan Terhadap Pengelolaan Sampah Kawasan dan Timbulan di Kota Tangerang Selatan. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 13(Vol. 13 No. 1), 7–14.
<https://doi.org/10.23969/kebijakan.v13i1.45>
- Umar Sidiq, M. C. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. CV. Nata Karya.
- Zulkarnaini, Z., Sujianto, S., Wawan, W., & Mashur, D. Institutional Synergy In Sustainable Peatland Management. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(4), 420-424.